

EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO*EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF CASH DISPOSING SYSTEMS AND PROCEDURES AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD OF MANADO CITY*

Oleh:

**Mia Messy Sambuaga¹
Sifrid S Pangemanan²
Stanley Kho Walandouw³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[1mia.sambuaga.ms@gmail.com](mailto:mia.sambuaga.ms@gmail.com)[2sifridp_s@unsrat.ac.id](mailto:sifridp_s@unsrat.ac.id)[3stanleykho99@gmail.com](mailto:stanleykho99@gmail.com)

Abstrak: Prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 Pada Sekretariat DPRD Kota Manado, dan 2) Untuk mengetahui laporan-laporan apa saja yang dihasilkan dalam prosedur pengeluaran kas Pada Sekretariat DPRD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado telah melaksanakan sistem dan prosedur pengeluaran kas secara efektif dan sudah sesuai dengan Permendagri No.13Tahun 2006. Sebaiknya pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado melaksanakan sistem dan prosedur pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 dan perlu adanya pelatihan dalam menggunakan sistem ESPEDE tentang penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas.

Kata Kunci: Pengeluaran Kas, Sistem dan Prosedur

Abstract: The cash disbursement procedure needsto be designed in such a way that only those expenses that have been approved and are true for company activities are recorded in the opening of the company. This study aims: 1) to find out what are the procedures that make up the cash disbursement system according to the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 13 of 2006 at the Secretariat DPRD Manado, and 2) to find out what reports are generated in the cash disbursement procedure the Secretariat DPRD Manado. This research uses qualitative analysis. The experiment was conducted at the Secretariat DPRD Manado. The method uses descriptive research. The analysis showed the Secretariat DPRD Manado has implemented systems and procedures effectively and cash expenditures are in accordance with Regulation No.13 of 2006. Should the leadership of the Secretariat DPRD Manado to implemented systems and procedures in accordance with the cash disbursements new regulations that Government Regulation No.18 of 2017 and here is a need for training in using the ESPEDE system about implemented systems and procedures in accordance with the cash disbursements.

Keywords: Disbursements, System and Procedures.

Latar Belakang

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan suatu kesatuan unsur-unsur sistem akuntansi pengeluaran kas yang saling bekerja sama diantaranya yaitu fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan serta sistem pengendalian intern yang mengatur kegiatan pengeluaran kas.

Penerapan sebuah sistem akuntansi dalam suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menangani dan mengatur jalannya semua aktivitas perusahaan/kantor baik yang bersifat operasional maupun non operasional sangatlah penting. Dengan adanya penerapan sistem akuntansi dalam perusahaan/kantor diharapkan semua aktifitas perusahaan/kantor dapat berjalan baik terutama yang berkaitan erat dengan lajunya alur kas yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar.

Penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas yang baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai beberapa manfaat penting. Manfaat tersebut antara lain adalah mengefektifkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan penggelapan uang kas serta membantu perusahaan/kantor dalam memprediksi penentuan besarnya anggaran kas yang harus tersedia untuk aktifitas perusahaan/kantor pada periode mendatang.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

Tujuan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dapat tercapai apabiladiimbangi dengan unsur-unsur yang mendukung Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yaitu fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas, bagan alir dokumen serta Sistem Pengendalian Intern

Prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pengelolaan kas dalam suatu perusahaan memerlukan perhatian yang cukup serius. Salah satu pengeluaran kas adalah pembelian, baik pembelian persediaan, perlengkapan, baik secara tunai atau kredit. Pembelian adalah kegiatan pemilihan sumber, pemesanan dan perolehan barang dan jasa sebagai salah satu aktivitas utama operasi bisnis perusahaan (Mulyadi, 2009). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang *“Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado”*.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur yang membentuk system pengeluara kas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 Pada Sekretariat DPRD Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan dasar mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang tertarik Sebuah perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnisnya dan kemudian mencatat peristiwa itu untuk memberikan sejarah kegiatan keuangan. Rekaman terdiri dari menyimpan catatan harian peristiwa sistematis, kronologis, diukur dalam dolar dan sen. Akhirnya, mengkomunikasikan informasi yang dikumpulkan kepada pengguna yang berminat dengan cara laporan akuntansi disebut laporan keuangan (KIESO 2016:2).

Pengertian Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

“Pengeluaran kas adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain, dan pengumpulan pembayaran-pembayaran.” (Mujilan, 2012:45). “Pengeluaran kas di dalam perusahaan yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran 7 yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat menggunakan cek, melainkan menggunakan dana kas kecil”, (Mulyadi, 2017:425). Romney (2016:463) menyebutkan bahwa siklus pengeluaran adalah “serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait secara terus menerus, yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa”. Tujuan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dapat tercapai apabila diimbangi dengan unsur-unsur yang mendukung Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yaitu fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang

digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas, bagian alih dokumen serta Sistem Pengendalian Intern.

Prosedur Pengeluaran Kas

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 pasal 228 sampai pasal 232 mengenai prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merumuskan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan melaporkan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pengertian Kas

Kas merupakan aktiva lancar yang paling berharga bagi perusahaan/kantor karena sifatnya yang likuid. Hampir semua transaksi bermula dan berakhir ke penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kas dan setara kas menurut PSAK No.2 menyatakan bahwa: "Kas terdiri dari saldo kas (cash in hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah inventasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Menurut Weygandt, "kas terdiri dari koin, uang kertas, cek, money order (wesel atau kiriman di tangan melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank), dan uang tunai ditangan atau di simpan di bank atau semacam deposito.

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Dalam rangka melaksanakan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah baik di tingkat SKPD maupun di tingkat SKPKD diperlukan penatausahaan yang baik pula. Penatausahaan yang dilakukan yaitu penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran. Untuk itu secara singkat penulis akan menguraikan tentang penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah di tingkat SKPKD.

Penatausahaan Pengeluaran (Sistem dan Prosedur Pengeluaran)

PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui Surat Pemberitahuan untuk menyusun Rancangan DPA-SKPD yang selanjutnya Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD. PPKD mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD. Setelah penerapan anggaran kas PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD (Surat Pencairan Dana). SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.

Prosedur pertama dimulai dari Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rancangan DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD.

Prosedur pertama dimulai dari Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rancangan DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD.

Penelitian Terdahulu

Antika (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengeluaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan hasil dari penelitian tersebut yaitu mengetahui pelaksanaan dan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengeluaran Kas yang telah diterapkan pada Dinas PRKP Kabupaten Lamongan.

Kasakeyan, Karamoy, Mawikere (2020) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Sisten dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur belanja langsung tunai di PT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pandoh, Tinangon, Lambey (2016) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado

hasil penelitian yaitu penerapan Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado.

Singgima, Pinatik (2016) dalam judul penelitian yaitu Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan hasil penelitiannya menunjukkan pengeluaran kas belanja untuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya serta untuk barang dan jasa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah bukan Bendahara pengeluaran kas pada SKP, dengan menerbitkan SP2D yang sebelumnya telah dibuat Surat Penyediaan Dana oleh Pengguna/Kuasa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dapat diartikan bahwa data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka atau numerik sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan ekspetasi sementara dibalik kisah nyata yang terjadi secara mendalam, rinci, dan tuntas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Maka penelitian ini pun mengambil lokasi tempat di Sekretariat DPRD Kota Manado di Jl. Balai Kota No.1, Tikala Kumaraka, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian April 2021–Juni 2021.

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan peneliti berupa data yang bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan Data Primer, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan di kantor kemudian dipelajari dan dianalisis yang berkaitan dengan metode pengakuan pendapatan dan beban
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik tanya jawab secara langsung dengan Ibu Olivia Ruth Pangalila selaku Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan, di Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado yang dapat memberikan informasi dan data-data yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas kantor yang berkaitan dengan permasalahan dalam pengakuan pendapatan dan beban. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan nyata mengenai sistem pengeluaran kas pada kantor Sekretariat DPRD Kota Manado.

Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dan dibutuhkan mengenai sistem pengeluaran kas Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado.

Proses Analisis

1. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung. Proses wawancara dilakukan pada pihak terkait dengan pertanyaan mengenai struktur organisasi serta tanggung jawab dari masing-masing bagian yang terkait dengan Sistem Pengeluaran Kas Pada Sekretariat DPRD Kota Manado.
2. Peneliti menganalisis cara beserta proses prosedur Sistem Pengeluaran Kas Pada Sekretariat DPRD Kota Manado.

3. Peneliti mempelajari dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan yang berkaitan dengan Sistem Pengeluaran Kas Pada Sekretariat DPRD Kota Manado.
4. Peneliti membandingkan hasil penelitian dengan teori pendukung yang menjadi landasan penelitian.
5. Peneliti menarik suatu kesimpulan dan saran-saran tentang sistem pengeluaran kas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administrative serta mempunyai ruang kerja. Pimpinan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Jawaban Informan Melalui Wawancara

Informan dalam penelitian ini adalah Kasubag Pembukuan dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kota Manado, dengan pendidikan IPDN dan berumur 36 tahun. Peneliti mengambil sampel satu orang yang menjadi subjek dalam penelitian. Berdasarkan wawancara dengan Kasubag pembukuan dan pelaporan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota Manado sudah berjalan/diterapkan dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan walikota Manado yang di dasari oleh peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 dan bioibing I 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Ia mengatakan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021 sudah diterapkan sistem online keuangan atau SIPEDE namun sekarang masih menggunakan sistem manual keuangan atau SIMDA.

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

Prosedur yang dijalankan untuk pencairan atau pengeluaran dana/kas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dapat dilihat pada proses pengelolaan data perjalanan Dinas pada bagian keuangan meliputi:

1. Menerima berkas perjalanan dinas dari ASN atau pendamping perjalanan Dinas anggota DPRD (surat tugas, SPPD yang sudah ditanda tangani pimpinan, laporan perjalanan Dinas, foto, tiket apabila perjalanan keluar daerah).
2. Kemudian dibuatkan rincian oleh salah satu staf keuangan (rincian dalam hal ini perhitungan rupiah untuk perjalanan tersebut)
3. Di verifikasi oleh KABAG/KASUB.
4. Rincian ditanda tangani oleh pelaku perjalanan bisnis, PPTK, Bendahara dan Sekretaris Dewan (SEKWAN).
5. Apabila telah lulus proses verifikasi, maka dibuatkan daftar untuk permintaan dana.
6. Setelah pembuatan daftar di input ke sistem (SIMDA) untuk dibuat SPP dan SPM.
7. Tanda tangan berkas SPP-SPM oleh PPTK-Bendahara-Sekretaris Dewan (SEKWAN) serta diverifikasi oleh KABAG keuangan,
8. Berkas di sortir, kemudian dibawa ke bagian keuangan Pemkot Manado
9. Proses pemeriksaan berkas SP2D.
10. Pendebitan pihak Bank SULUTGO.
11. Transfer ke rekening yang bersangkutan oleh bendahara pengeluaran.

Hasil Perbandingan antara Teori dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 1. Hasil Perbandingan Teori dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

Kegiatan	Keterangan	Hasil Penelitian
Prosedur Surat Penyediaan Dana (SPD)	Prosedur Surat Penyediaan Dana (SPD)	Efektif
Prosedur Surat Perintah Pembayaran (SPP)	Sesuai Dengan Permendagri No 13 Tahun 2006	Efektif
Prosedur Surat Perintah Membayar (SPM)	Sesuai Dengan Permendagri No 13 Tahun 2006	Efektif
Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Sesuai Dengan Permendagri No 13 Tahun 2006	Efektif
Prosedur Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Sesuai Dengan Permendagri No 13 Tahun 2006	Efektif

Sumber: Hasil Penelitian Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Teori dan Pada Sekretariat DPRD Kota Manado

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD kota Manado masih menggunakan Sistem Manual Keuangan (SIMDA) dan penggunaan Sistem Online (SIPEDE) belum berjalan secara maksimum karena kurangnya pengetahuan oleh pegawai terhadap penggunaan Sistem Online (SIPEDE) sehingga pegawai membutuhkan waktu pelatihan/belajar terhadap penggunaan Sistem Online (SIPEDE). Kemudian prosedur yang membentuk sistem pengeluaran pada Sekretariat DPRD kota Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 sudah diterapkan tetapi belum efektif, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD kota Manado sesuai dengan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 adalah efektif.

Dalam lembaga instansi negara kas itu merupakan suatu transaksi yang sering terjadi, semua dana yang dikeluarkan oleh organisasi misalnya digunakan untuk membiayai operasional organisasi, membayar jasa, berbelanja, membayar upah pegawai dan pengeluaran lain-lainnya. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil, seluruh pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu, terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Languju (2015) dimana peneliti sebelumnya sama-sama meneliti tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas dan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem pengeluaran kas sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaunang (2017) dimana peneliti sebelumnya samasama meneliti tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas, Hasil penelitiannya yaitu sistem dan prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan kedua penelitian tersebut mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun untuk saat ini Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado menerapkan aturan yang terbaru (aturan yang diperbaharui) dari Pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas pada sekretariat DPRD kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006.
2. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada sekretariat DPRD kota Manado sudah dilaksanakan secara efektif.

Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas pada sekretariat DPRD kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006.

2. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada sekretariat DPRD kota Manado sudah dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika. (2020). *Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/39420/> diakses tanggal 22 Februari 2021.
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. (2016). *Intermediate Accounting*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 2 Tentang Laporan Arus Kas– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Kaunang. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol 5, No.2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16087/15593>. Diakses tanggal 22 Februari 2021.
- Kasakeyan, Karamoy, Mawikere. (2020). Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 15, No 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28895> diakses tanggal 22 Februari 2021
- Languju, Tinangon, Pusung. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol 3, No 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7809> diakses tanggal 22 Februari 2021
- Mulyadi, 2009. *Akuntansi Biaya*, Edisi ke 5. Yogyakarta: STIE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 228 – Pasal 232
- Pandoh, Tinangon, Lambey. 2016. Evaluasi Sistem Pencatatan Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol 4, No 1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11857/11447> diakses tanggal 22 Februari 2021
- Romney, Marshal B & Paul John Steintbart. 2014. *Accounting Information System*. Edisi 13. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Singgima, Pinatik. (2016). Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol 4 No.1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11775> diakses tanggal 22 Februari 2021
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2002). *Accounting principles*, Fourth Edition. New York: Wiley & Son Inc.